

HUBUNGAN KETERSEDIAAN DAN PENDIDIKAN TENAGA GIZI TERHADAP KEJADIAN STUNTING DI SUMATERA BARAT, INDONESIA

Nur Ahmad Habibi^{1*}, Gusnedi¹, Edmon¹, Elsyie Yuniarti¹, Safyanti¹
Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Padang
Corresponding Author : nahindo2022@gmail.com

Abstract

The availability of an adequate number of qualified nutrition experts is a supporting factor for the success of nutrition programs and health transformation. The research aims to analyze the relationship between job suitability of nutrition professionals, education level, participation in training, and the competence of nutrition experts in relation to the nutritional status (prevalence of stunting) in West Sumatra, Indonesia. The study was conducted using a cross-sectional design, with a sample size of 698 nutrition professionals working in 16 districts/cities in West Sumatra. Data were collected through a questionnaire in Google Form format. This study revealed that 35.6% of nutrition professionals did not possess an active registration certificate. Around 43.9% had only completed a three-year diploma program, and 13.7% were not working in accordance with their profession. Approximately 65% of nutrition experts had not received training related to their authority, and 76.3% did not possess relevant competency certification to support their performance. There was a significant relationship between the number of nutrition professionals working in accordance with their profession, participation in training, and competency certification with the occurrence of stunting ($p < 0.05$). The conclusion is that the higher the number of nutrition professionals working in accordance with their profession, trained, and competent, the lower the prevalence of stunting in the area. Policy measures and efforts are needed to meet the needs of nutrition experts in terms of quantity and quality in order to strengthen nutrition programs and improve the level of health in West Sumatra.

Keywords: nutritionist professionals; stunting; health transformation

Abstrak

Ketersediaan jumlah dan kualifikasi ahli gizi yang memadai merupakan faktor pendukung keberhasilan program gizi dan transformasi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kesesuaian pekerjaan, tingkat pendidikan, partisipasi dalam pelatihan, dan kompetensi ahli gizi dengan kejadian masalah gizi stunting di Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan desain potong lintang, dengan sampel sebanyak 698 ahli gizi yang bekerja di 16 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui kuesioner dalam format Google Form. Penelitian ini menemukan bahwa 35,6% ahli gizi tidak memiliki surat tanda registrasi aktif. Sebanyak 43,9% masih memiliki tingkat pendidikan D-III, dan 13,7% ahli gizi tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Sekitar 65% ahli gizi tidak mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan kewenangannya, dan 76,3% tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan untuk mendukung kinerjanya. Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah ahli gizi yang bekerja sesuai dengan profesinya, partisipasi dalam pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dengan kejadian stunting ($p < 0,05$). Kesimpulannya adalah semakin tinggi jumlah ahli gizi yang bekerja sesuai dengan profesinya, terlatih, dan kompeten, maka berasosiasi dengan lebih rendahnya prevalensi stunting di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi dari segi kuantitas maupun kualitas guna memperkuat program gizi dan meningkatkan tingkat kesehatan di Sumatera Barat.

Kata kunci: stunting; nutritionist; transformasi kesehatan

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang masih banyak di temukan di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 mencapai 21,6%¹. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah di Indonesia yang masih memiliki angka kejadian stunting yang cukup tinggi di Indonesia. Prevalensi stunting di Sumatera Barat mencapai 25,2 %, dimana angka tersebut diatas prevalensi nasional. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar target pemerintah Indonesia mencapai prevalensi stunting dibawah 14% pada tahun 2024 dapat terwujud ²

Stunting merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu pada anak akibat kekurangan gizi secara kronis, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan³. Stunting didefinisikan sebagai kondisi ketika tinggi badan anak berdasarkan usia (height-for-age) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan anak WHO tahun 2006. Jika berada di bawah -3 SD, maka dikategorikan sebagai stunting berat (*severe stunting*)⁴. Permasalahan kesehatan ini memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif, yang memengaruhi individu dan komunitas hingga dewasa di masa depannya⁴.

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi permasalahan stunting adalah keterbatasan tenaga gizi yang terlatih dan kompeten. Selain itu, masih banyak juga ditemukan tenaga gizi yang bekerja tidak sesuai dengan ranah keilmuan dan kewenangannya. Tenaga gizi tidak dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang terstandar, serta disibukkan dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Kondisi ini mengakibatkan program gizi yang direncanakan oleh pemerintah tidak efektif pelaksanaannya.

Tenaga gizi merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di bidang gizi dan berperan penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan status gizi. Tenaga gizi bertugas dalam berbagai kegiatan, mulai dari penilaian status gizi, perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi, penyuluhan dan konseling gizi, hingga pemantauan dan evaluasi program gizi di berbagai tatanan, seperti rumah sakit, puskesmas, institusi pendidikan, hingga komunitas. Berdasarkan jenjang pendidikan dan lingkup pekerjaannya, tenaga gizi dapat diklasifikasikan sebagai nutrisisionis (lulusan minimal D3 Gizi), dietisien (lulusan profesi gizi)⁵.

Tenaga gizi memainkan peran penting dalam penanganan masalah stunting. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mempromosikan kebiasaan makan yang sehat, mencegah dan menangani gizi buruk, serta merancang intervensi gizi yang efektif khusus untuk anak-anak pada tahun-tahun awal kehidupan ⁶. Dengan memberikan dukungan gizi yang tepat, tenaga gizi dapat membantu mencegah dan mengurangi kejadian stunting, dengan meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan.

Tenaga gizi juga memiliki peran besar terhadap terwujudnya transformasi kesehatan. Tenaga gizi dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan diantaranya promosi kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit, manajemen penyakit kronis dan pelayanan kesehatan masyarakat⁷. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi hubungan ketersediaan tenaga gizi dan kompetensi terhadap implikasi stunting di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan *cross-sectional* untuk menganalisis hubungan antara ketersediaan dan tingkat pendidikan tenaga gizi dengan kejadian stunting di Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan april-mei 2023. Studi mengeksplorasi karakteristik, pendidikan, pelatihan, deskripsi pekerjaan, dan kompetensi tenaga gizi di Sumatra Barat. Kami mengumpulkan informasi dari 698 orang tenaga gizi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kriteria inklusi responden dalam penelitian ini meliputi : (a) Tenaga gizi yang memiliki ijazah minimal D3 Gizi, Sarjana Gizi (S.Gz), Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik (STr.Gz), serta Dietisien; b) Bekerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat; (c) responden bersedia memberikan keseluruhan data yang dibutuhkan. Kriteria eksklusi meliputi responden tidak dapat atau tidak bersedia memberikan data penting yang dibutuhkan, seperti riwayat pendidikan, masa kerja, tempat bekerja, serta peran dalam penanganan stunting di wilayah kerjanya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi Data stunting pada penelitian ini diperoleh secara sekunder dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menyediakan informasi prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sedangkan data primer mengenai pendidikan tenaga gizi dikumpulkan melalui survei daring menggunakan *Google Form* yang disebarakan kepada tenaga gizi yang berada di wilayah penelitian. Kuesioner Google Form berisi pertanyaan mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan yang pernah diikuti, dan ketersediaan tenaga gizi di unit kerja masing-masing. Analisis data menggunakan tingkat kepercayaan 95% ($p\ value < 0,05$). Uji deksriptif digunakan untuk menyajikan data karakteristik responden dan uji korelasi digunakan untuk menghubungkan tingkat kesesuaian pekerjaan tenaga gizi, tingkat pendidikan, kompetensi terhadap kejadian stunting di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Tenaga Gizi di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1 menunjukkan karakteristik tenaga gizi yang mengikuti survei dalam peneliti ini. Karakteristik meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan usia dari responden. Berdasarkan jenis kelaminnya, didapatkan sebagian besar tenaga gizi di Provinsi Sumatera Barat berjenis kelamin perempuan dengan persentase 95%. Tingkat pendidikan dari tenaga

gizi sangat beragam, mulai dari tingkatan diploma 3 (D3) hingga S3. D3 dan DIV/ S1 merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh tenaga gizi di Provinsi Sumatera Barat. Persentase tingkat pendidikan D3 sebesar 43.8% dan DIV/ S1 52,1%.

Dilihat dari pekerjaan, diketahui sebagian besar tenaga gizi bekerja sebagai ahli gizi baik nutrisisionist maupun dietisien dengan jumlah sebesar 84.8%. Sisanya bekerja sebagai dosen, tenaga pendidik, pengusaha dan pekerjaan lainnya. Sebagian besar ahli gizi bekerja di rumah sakit maupun puskesmas. Selanjutnya, dilihat dari karakteristik umur, rata-rata tenaga gizi di Provinsi Sumatera barat berumur 35,75 tahun, dengan umur paling muda adalah 22 tahun dan umur paling tua adalah 67 tahun. Umumnya tenaga gizi bekerja dibawah usia 60 tahun. Namun terdapat tenaga gizi yang bekerja sukarela dalam Posyandu.

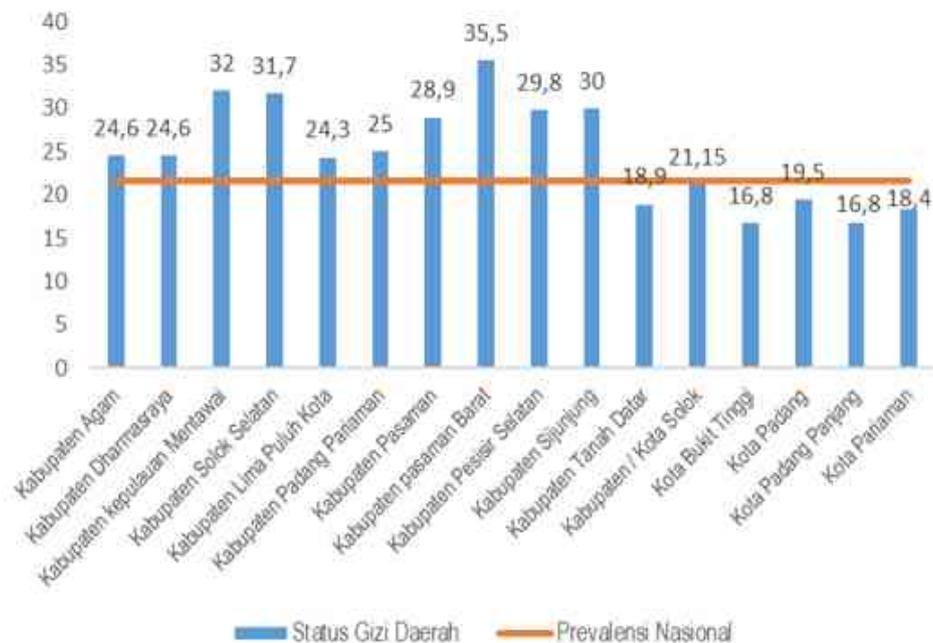
Tabel 1. Karakteristik Umum Tenaga Gizi

Informasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis kelamin		
Perempuan	665	95.0%
Laki-Laki	33	5.0%
Pendidikan		
D3	306	43.8%
D4/ S1	364	52.1%
S2	35	5.0%
S3	3	0.4%
Pekerjaan saat ini		
Ahli Gizi	592	84.8%
Dosen/ Tenaga Pendidik	25	3.6%
Pengusaha	1	0.1%
Pekerjaan lain	34	4.9%
Umur		
Rata-rata	35.75	
Min	22	
Max	67	

Prevalensi Stunting di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di provinsi sumatera barat sebesar 25,2%. Nilai tersebut berada diatas prevalensi nasional sebesar 21,6 %. Gambar 1 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di kabupaten/kota provinsi sumatera barat sangatlah beragam. Terdapat daerah yang berada diatas dan dibawah prevalensi stunting nasional, dari 16 daerah didapatkan 10 daerah memiliki prevalensi stunting diatas dan 6 daerah berada dibawah prevalensi nasional. Prevalensi tertinggi berada di kabupaten pasaman dengan jumlah 35,5%, dan prevalensi terendah berada di kabupaten padang panjang dengan jumlah 16,8%. Meskipun demikian

belum ada daerah yang memiliki prevalensi stunting dibawah 14%, yang merupakan target dari pemerintah di tahun 2024.



Gambar 1. Prevalensi Stunting di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat

Ketersediaan dan Kompetensi Tenaga Gizi Terhadap Stunting

Penelitian ini mengamati hubungan ketersediaan dan kompetensi tenaga gizi terhadap stunting. Ketersediaan tenaga gizi dilihat dari kesesuaian pekerjaan tenaga gizi terhadap jabatan yang dimiliki saat ini dan status keaktifan surat tanda registrasi tenaga gizi (STR). Selanjutnya kompetensi dilihat dari keikutsertaan pelatihan, sertifikasi kompetensi yang telah dimiliki dan jumlah tingkat pendidikan D3. Uji hubungan dianalisis dengan menghubungkan ketersediaan dan kompetensi tenaga gizi terhadap kejadian stunting secara menyeluruh yaitu pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Hasil analisis hubungan antara ketersediaan dan kompetensi tenaga gizi dengan kejadian stunting di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan pada beberapa indikator. Rata-rata kesesuaian jabatan tenaga gizi dengan pekerjaan saat ini mencapai 87.39%, dengan nilai tertinggi di Kabupaten Dharmasraya 100% dan terendah di Kabupaten Solok Selatan 64.30%. Adapun riwayat pelatihan tenaga gizi rata-rata sebesar 34.77%, dengan Kota Padang Panjang mencatat angka tertinggi 54.40% dan Kabupaten Pasaman Barat terendah 18.60%. Untuk sertifikasi kompetensi, rata-rata hanya 23.70%, dengan Kabupaten Pasaman sebagai wilayah dengan persentase tertinggi 42.60%) dan Kabupaten Lima Puluh Kota serta Pasaman Barat terendah 10%. Status STR aktif tenaga gizi secara rata-rata tinggi yaitu 81.41%, dengan Kabupaten Tanah Datar mencapai 100%.

Persentase tenaga gizi dengan pendidikan terakhir D3 rata-rata 43,89%, tertinggi di Kabupaten Solok Selatan 78.60% dan terendah di Kota Bukit Tinggi (26,8%).

Tabel 2. Hubungan ketersediaan dan kompetensi tenaga gizi terhadap stunting

Kabupaten/ Kota	Kesesuaian Jabatan Tenaga dengan Pekerjaan Saat ini (%)	Riwayat Pelatihan (%)	Sertifikasi Kompeten si (%)	Statu s STR Aktif (%)	Tenaga gizi dengan pendidikan terakhir D3 (%)
Kabupaten Agam	83	34	21.3	78.7	53.2
Kabupaten Dharmasraya	100	36.7	23.3	73.3	56.7
Kabupaten Mentawai	80	42.9	28.6	75.7	28.6
Kabupaten Solok Selatan	64.3	21.4	14.3	78.6	78.6
Kabupaten Lima Puluh Kota	94	34	10	76	34
Kabupaten Padang Pariaman	92.7	26.8	12.2	87.8	46.3
Kabupaten Pasaman	85	42.6	42.6	94.7	47.4
Kabupaten pasaman Barat	80	18.6	10	78.4	30.2
Kabupaten Pesisir Selatan	95.6	23.8	15.6	81.2	57.4
Kabupaten Sijunjung	80	21.4	14.3	68.6	35.7
Kabupaten Tanah Datar	90	50	25	100	55
Kabupaten / Kota Solok	91.7	33.3	25	79.2	50
Kota Bukit Tinggi	90	26.8	30.7	89.3	26.8
Kota Padang	88	48.6	39.3	85.7	37.1
Kota Padang Panjang	90	54.4	39.6	73	33.3
Kota Pariaman	94	41.1	27.5	82.5	32
Rerata	87.39	34.77	23.70	81.41	43.89
<i>p value</i>	$p < 0.05$	$p < 0.05$	$p < 0.05$	$p > 0.05$	$p > 0.05$
<i>Pearson Correlation</i>	-0,552	-0,990	-0,995	-0.307	0.208

Analisis statistik menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara kesesuaian jabatan, riwayat pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tenaga gizi di Provinsi Sumatera Barat dengan kejadian stunting $p < 0.05$. Korelasi terkuat terdapat pada riwayat pelatihan $r = -0.990$ dan sertifikasi kompetensi $r = -0.995$, mengindikasikan bahwa semakin tinggi pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga gizi, maka kejadian stunting cenderung menurun. Sedangkan korelasi antara status STR aktif dan pendidikan terakhir D3 dengan kejadian stunting tidak signifikan $p > 0.05$, dengan korelasi yang lemah $r = -0.307$ dan 0.208 .

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga gizi di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Sebanyak 13,61% tenaga

gizi diketahui tidak bekerja sesuai dengan kompetensi profesinya, dan 16,59% lainnya belum memiliki registrasi aktif sesuai dengan ketentuan profesi. Temuan ini juga memperlihatkan adanya hubungan yang bermakna antara tenaga gizi yang bekerja sesuai kompetensinya dengan kejadian stunting di wilayah tersebut. Ketersediaan tenaga gizi yang kompeten dalam jumlah yang memadai adalah sebuah kebutuhan daerah untuk mengatasi permasalahan stunting. Tenaga gizi memiliki peran krusial mulai dari perencanaan, intervensi maupun pemantauan keberhasilan program gizi di sebuah daerah. Studi kami menemukan bahwa ketersediaan tenaga gizi di provinsi sumatera barat masih belum memadai dari jumlah maupun tingkat pendidikan dan kompetensinya.

Pada studi ini, didapatkan informasi bahwa masih banyak tenaga gizi sering dilibatkan dalam kegiatan administrasi, keuangan maupun penunjang lainnya, yang mengakibatkan tenaga gizi tidak dapat fokus menyelesaikan tugas, pokok, fungsi utamanya. Disisi lain, program gizi sering dikelola oleh tenaga kesehatan lain, seperti dokter atau perawat, bidan. Sehingga penerapan proses asuhan gizi terpadu (PAGT) tidak dapat berjalan dengan efektif. Penyediaan tenaga gizi yang fokus dalam melaksanakan program gizi dinilai penting untuk diwujudkan. Meskipun tenaga gizi dituntut untuk dapat *multi tasking* atau mengerjakan banyak pekerjaan dalam waktu yang sama. Namun pekerjaan tenaga gizi terhadap program gizi tetaplah harus menjadi prioritas utama ⁸.

Disisi lain, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tenaga gizi yang tidak teregistrasi aktif STR nya terhadap kejadian stunting. Ini mungkin disebabkan bahwa tenaga gizi telah berpengalaman dalam menjalankan program gizi. Serta tenaga gizi, juga sering berkonsultasi dengan teman lainnya, maupun akademisi apabila bertemu dengan permasalahan di lapangan. Meskipun demikian, pengaktifan STR tetap harus segera dilakukan, guna memberikan legalitas profesi dalam menjalankan pekerjaannya ⁹. Legalitas profesi melalui STR tetap penting untuk memastikan perlindungan hukum dan profesionalisme tenaga gizi, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan¹⁰.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kompetensi tenaga gizi yang diukur melalui indikator riwayat pelatihan dan sertifikasi kompetensi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Korelasi yang sangat kuat dan negatif antara kedua indikator ini dengan stunting (masing-masing $r = -0,990$ dan $r = -0,995$; $p < 0,05$) menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi tenaga gizi yang memiliki pelatihan dan sertifikasi, maka prevalensi stunting di suatu daerah cenderung lebih rendah.

Hal ini menegaskan bahwa kompetensi praktis tenaga gizi menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program intervensi gizi. Ketika tenaga gizi memiliki keterampilan teknis yang memadai, mereka dapat menjalankan proses asuhan gizi terpadu (PAGT) secara lebih optimal, mulai dari penilaian status gizi, perencanaan intervensi, pemantauan pertumbuhan,

hingga edukasi kepada masyarakat. Nassemun hanya sekitar 34,7% tenaga gizi yang tercatat mengikuti pelatihan dalam satu tahun terakhir, dan bahkan lebih sedikit lagi (23,7%) yang memiliki sertifikat kompetensi resmi. Rendahnya angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas yang perlu segera diatasi.

Hasil ini sejalan dengan studi lain, yang menemukan bahwa tenaga gizi yang mengikuti pelatihan secara berkala memiliki efektivitas kerja lebih tinggi dalam menurunkan angka stunting¹¹. Selain itu, sertifikasi kompetensi seperti *Nutrition Care Process* (NCP), GMP, atau keamanan pangan merupakan indikator profesionalisme yang diakui secara nasional dan internasional, dan penting untuk menjamin mutu pelayanan gizi di tingkat lapangan^{12,13}.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga gizi, khususnya lulusan D3, tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting ($p > 0.05$; $r = 0.208$). Ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal bukan satu-satunya faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program gizi. Meskipun pendidikan D3 memberikan dasar ilmu gizi yang penting, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan keterlibatan aktif dalam program gizi lebih menentukan efektivitas kerja di lapangan. Sebagian besar tenaga gizi dengan latar belakang D3 telah berpengalaman lama di lapangan, sehingga efektivitas mereka lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan pelatihan berkelanjutan¹⁴.

Pemberian pelatihan kepada tenaga gizi perlu untuk dilakukan secara berkala, program pelatihan ini akan membantu tenaga gizi meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya¹⁵. Selain pelatihan, tenaga gizi perlu diberikan motivasi dan bonus insentif saat bekerja agar semakin semangat dalam meningkatkan kemampuannya. Kemampuan tenaga gizi meliputi sejumlah aspek yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dalam bidang gizi¹⁶.

Tenaga gizi harus dapat berkomunikasi dengan baik dan memberikan edukasi gizi kepada individu atau kelompok. Mereka harus mampu mengkomunikasikan informasi gizi dengan jelas dan memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan individu yang mereka layani. Kemampuan konseling juga penting untuk membantu individu mengubah perilaku makan mereka¹⁷. Tenaga gizi harus memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka harus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam bidang gizi, mengikuti pelatihan lanjutan, dan mengikuti sertifikasi atau program pendidikan berkelanjutan yang relevan. Selain itu, integritas, empati, kepekaan terhadap budaya, etika profesional, kemampuan manajemen¹⁸, dan kemampuan organisasi juga penting bagi tenaga gizi dalam menjalankan tugas mereka dengan baik^{19,20}.

Rekomendasi

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kualitas tenaga gizi dalam menurunkan prevalensi stunting di Sumatera Barat. Ketersediaan tenaga gizi yang berpendidikan minimal

D-III, yang memiliki kesesuaian jabatan, riwayat pelatihan, dan sertifikasi kompetensi, berasosiasi dengan angka stunting yang lebih rendah di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga gizi merupakan aspek kritis dalam efektivitas program penanganan stunting. Status Surat Tanda Registrasi (STR) aktif dan tingkat pendidikan formal tidak berasosiasi signifikan, sehingga pelatihan dan sertifikasi profesional menjadi fokus utama dalam meningkatkan kompetensi dan efektivitas tenaga gizi.

Pengambil kebijakan perlu memprioritaskan penunjukan tenaga gizi terlatih dalam pengelolaan program gizi. Penempatan yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian tenaga gizi dapat meningkatkan efektivitas intervensi penanggulangan stunting. Advokasi dan edukasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait kontribusi strategis tenaga gizi dalam sistem kesehatan dan pengambilan keputusan manajemen program²¹. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan harus diperkuat guna mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga gizi. Standarisasi deskripsi pekerjaan dan penataan unit kerja tenaga gizi secara konsisten di berbagai fasilitas kesehatan di Sumatera Barat perlu diupayakan. Satuan tugas tenaga gizi berperan penting dalam menyediakan pelatihan terarah, dukungan profesional, serta advokasi terkait peran dan penempatan tenaga gizi²².

Upaya efektif penurunan stunting juga harus didukung oleh peningkatan jumlah tenaga gizi yang memadai dan terlatih. Tenaga gizi berkompoten mampu melakukan penilaian status gizi, merancang intervensi gizi yang tepat, memberikan edukasi kepada keluarga, serta memantau perkembangan anak. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program peningkatan kapasitas tenaga gizi, termasuk pembentukan tim tugas khusus dan program pelatihan guna memperkuat peran tenaga gizi di daerah rawan stunting seperti Sumatera Barat. Penguatan sistem melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan, pembiayaan memadai, dan infrastruktur yang memadai diperlukan untuk memastikan integrasi optimal tenaga gizi dalam layanan kesehatan²³.

KESIMPULAN

Semakin tinggi jumlah ahli gizi yang bekerja sesuai dengan profesinya, terlatih, dan kompeten, maka berasosiasi dengan lebih rendahnya prevalensi stunting di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi dari segi kuantitas maupun kualitas guna memperkuat program gizi dan meningkatkan tingkat kesehatan di Sumatera Barat. Pendirian satuan tugas ahli gizi di Sumatra Barat sangat penting untuk memperkuat program gizi dan meningkatkan hasil kesehatan di wilayah tersebut. Satuan tugas tersebut harus terdiri dari ahli gizi yang terlatih dengan kompetensi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program gizi. Pemerintah dan asosiasi ahli gizi

harus bekerja sama untuk mendukung pendirian satuan tugas ini dan memastikan bahwa program gizi didasarkan pada bukti ilmiah, terkoordinasi dengan baik, dan efektif dalam mengatasi masalah gizi di Sumatra Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenkes. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kemenkes. 2023;1–7.
2. Satriawan E. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (National Strategy for Accelerating Stunting Prevention 2018-2024). Tim Nas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekr Wakil Pres Republik Indones. 2018;(November):1–32.
3. Bahagia Febriani AD, Daud D, Rauf S, Nawing HD, Ganda IJ, Salekede SB, et al. Risk factors and nutritional profiles associated with stunting in children. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.* 2020;23(5):457–63.
4. Soliman A, De Sanctis V, Alaaraj N, Ahmed S, Alyafei F, Hamed N, et al. Early and long-term consequences of nutritional stunting: From childhood to adulthood. *Acta Biomed.* 2021;92(1):1–12.
5. Menaker. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 2019;
6. Rahayu S, Marsaoly OH. Peran Nutritionist Dalam Penanganan Stunting. Kediri: Strada Press; 2020.
7. Kemenkes. Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Kementerian Kesehat RI. 2021;
8. Unctad. Prioritization and resource allocation as a tool for agency effectiveness Note. 2013;(April).
9. Kemenkes. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1910/2022 Tentang Standar Profesi Dietisien. Kementerian Kesehat RI. 2022;1–55.
10. Kemenkes. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehat Republik Indones. 2014;
11. Rahmadani RA, Setiawati A, Aris I, Lontaan A. Effectiveness of nutrition education on stunting prevention behavior in mothers under five. 2025;1–8.
12. Bukit DS, Keloko AB, Ashar T. Dukungan Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Stunting di Desa Tuntungan 2 Kabupaten Deli Serdang. *Trop Public Heal J.* 2021;1(2):67–71.
13. Kris-Etherton PM, Akabas SR, Douglas P, Kohlmeier M, Laur C, Lenders CM, et al. Nutrition Competencies in Health Professionals' Education and Training: A New Paradigm. *Adv Nutr [Internet].* 2015;6(1):83–7. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831322006251>
14. Mangundap SA, Amyadin A, Tampake R, Umar N, Iwan I. Health Cadre Education on

- Providing Stunting Risk Family Assistance toward Children. *Open Access Maced J Med Sci.* 2022;10(G):306–10.
15. Rudhaliawan VM, Utami HN, Hakam MS. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kemampuan Kerja dan Kinerja Kader. *Fak Ilmu Adm Univ Brawijaya Malang.* 2017;1–10.
 16. Dietitians Board. *Dietitians Board Professional Standards and Competencies For Dietitians.* Wellington: Dietition Boards; 2017. 8–16 p.
 17. Gable J. *Counselling Skills for Dietitians.* Counselling Skills for Dietitians. Hongkong: Blackwell Publishing; 2007.
 18. Al Salmi Q, Al Fannah J, de Roodenbeke E. The imperative of professionalising healthcare management: A global perspective. *Futur Healthc J [Internet].* 2024;11(3):100170. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2514664524015601>
 19. Veenstra GL, Dabekaussen KFAA, Molleman E, Heineman E, Welker GA. Health care professionals' motivation, their behaviors, and the quality of hospital care: A mixed-methods systematic review. *Health Care Manage Rev.* 2022;47(2):155–67.
 20. Varkey B. Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Med Princ Pract Int J Kuwait Univ Heal Sci Cent.* 2021;30(1):17–28.
 21. Arieffiani D, Ekowanti MRL. Evaluating Local Government Policy Innovations: A Case Study of Surabaya's Efforts in Combating Stunting and Enhancing Public Health Services Quality. *J Bina Praja.* 2024;16(1):1–20.
 22. WHO (2013). Transforming and Scaling up health professionals' education and training. *WHO Publ [Internet].* 2013;124. Available from: https://www.who.int/hrh/resources/transf_scaling_hpet/en/
 23. Imron A, Yanuar Dini C, Arya Pratama S, Kurniawan Aziz U, Mudiayah S, Herowati D, et al. Sinergi Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. *Media Gizi Indones.* 2022;17(1SP):239–43.